



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 275/KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1/KEP/BPP/2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBINA KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
DAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/BPP/2024 tentang Penunjukan Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa dikarenakan adanya mutasi, promosi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada lingkup Kejaksaan Negeri Pariaman, maka perlu untuk dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/BPP/2024 tentang Penunjukan Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/BPP/2024 tentang Penunjukan Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan ;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/BPP/2024 tentang Penunjukan Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- KEDUA : Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Anggota Tim Kuasa Hukum.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 295 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 14 JUNI 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 1/KEP/BPP/2024 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PEMBINA KUASA HUKUM
 PEMERINTAH DAERAH DAN TIM KUASA
 HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH			
1.	SUHATRI BUR	Bupati	Ketua
2.	RAHMANG	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	RUDI RAHMAD, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH DARI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH			
5.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	FERDIANTO AMBRA, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
7.	SALMA FARIANIS, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
8.	LISMARRIYANTI, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
9.	ARIE LEO TAMA, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
10.	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
11.	FAUZI RIZA UMAMI, S.H	Analisis Hukum	Anggota
12.	YESSY OKFRIMA SARI, S.H	Tenaga Harian Lepas	Anggota
13.	ILHAM AKBAR, S.H	Tenaga Harian Lepas	Anggota
14.	SUCI LAILA MAGHFIRAH, S.Pd	Tenaga Harian Lepas	Anggota
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH DARI JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN			
15.	R. BAGUS PRIYONGGO, S.H, M.H, CLA	Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASIKPD/ASISTEN
 KABAG. HUKUM

16.	ANITA YULIANA, S.H, M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Sekretaris
17.	YANDI MUSTIQA, S.H, M.H	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
18.	ADRIANTI, S.H	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
19.	YENNI FAJRIA, S.H	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
20.	MELDIANA SANTUNI YUNDR, S.H	Jaksa Pengacara Negara	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR